

PEMBAHARUAN DAN PENATAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Arifuddin M. Arif

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Jalan Diponegoro No. 23 Palu

e-mail: aa.cerdas@yahoo.co.id.

Abstrak:

Pelaksanaan perencanaan pembaharuan pendidikan di daerah, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur adopter inovasi serta elemen-elemen lainnya yang terlibat dan ikut dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, seperti; dimensi masyarakat, politik, dan ekonomi. Adanya indikasi masihterjadinya miskonsepsi dalam aspek kebijakan riil perencanaan pembangunan pendidikan di daerah, maka perlu membangun konsep penataan ulang perencanaan pembangunan pendidikan di daerah yang berbasis pada pendekatan, model, metodologi, instrumen, dan indikator pencapaian yang jelas, terukur, dan akuntabel.

Abstract:

The implementation of education renewal planning in the regions cannot be separated from the elements of innovation adopter and other elements involved and involved in the educational innovation process, such as; dimensions of society, politics and economics. There are indications that there are still misconceptions in the real aspects of education development planning in the regions, it is necessary to develop the concept of rearranging education development planning in the regions based on clear, measurable, and accountable approaches, models, methodologies, instruments and achievement indicators.

Kata Kunci: Pembaharuan, Penataan Sistem, Perencanaan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa yang ditunjukkan oleh berbagai indikator di antaranya peningkatan di bidang ekonomi dan sosial budaya, kematangan etika dan budaya berdemokrasi warga negara, kemampuan mengolah dan mengelola sumber daya alam, kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki daya saing global. (H.A. Tabrani Rusyan, 2012:36). Untuk mencapai tuntutan dan kualitas tersebut, maka pendidikan sebagai instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, masyarakat, dan pemerintah.

Menyadari peran strategis pendidikan tersebut, maka pemerintah menjadikan pendidikan sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan nasional dalam membangun sumber daya manusia. Pemerintah terus berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional

bagi seluruh warga negara secara merata, adil, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di tengah-tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan pendidikan bukanlah urusan yang sederhana melainkan urusan yang sangat kompleks, dinamis, dan penuh problem dan tantangan. Dinamika, kompleksitas, dan tantangan pendidikan tersebut memerlukan upaya konstruktif dan inovatif dalam menata pendidikan nasional dalam dimensi perencanaan, pembaharuan dan penataan sistem pembangunan pendidikan yang berorientasi mutu dan daya saing global tanpa kehilangan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan identitas nasional.

Adanya kebijakan pengelolaan pendidikan melalui pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dewasa ini sangat menentukan sosok dan kinerja sistem pendidikan nasional di masa depan. Tujuan utama kebijakan desentralisasi pendidikan adalah membangun dan menata sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih mantap, dan lebih maju dengan

seoptimal mungkin memberdayakan potensi daerah dan partisipasi masyarakat lokal yang tetap mengacu pada kerangka sistem pendidikan nasional.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pendidikan sangat tergantung pada kemampuannya dalam merencanakan kebijakan pendidikan di daerah yang tetap sejalan dengan berbagai kebijakan nasional di bidang pendidikan. Selain itu, pembangunan pendidikan daerah diperlukan upaya penataan dan pembaharuan sistem pengelolaan yang berorientasi pada pemerataan mutu dan kesempatan belajar masyarakat, layanan pendidikan berkualitas dan berakarakter, desain pendidikan yang memberdayakan potensi yang digali dari kemajemukan sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, iptek, dan kekuatan lainnya.

Pentingnya mendesain pendidikan dengan perencanaan pembangunan pendidikan yang berdimensi inovatif inilah yang menjadi alasan untuk membahas dan mengkaji tulisan ini dengan judul "Pembaharuan dan Penataan Sistem Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Daerah". Kajian pembaharuan pendidikan dikaji secara konseptual teoritis dari sudut pandang masyarakat, politik, dan ekonomi. Sedangkan penataan sistem perencanaan pendidikan dikaji dari sudut pandang pendekatan, model, metode, dan indikator kebijakan daerah dalam mengembangkannya.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan kajian ini adalah, bagaimana pembaharuan dan perencanaan sistem pembangunan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan di daerah. Dari pokok masalah di atas, dijabarkan ke dalam dua sub masalah yaitu: Bagaimana konsep perencanaan pembaharuan pendidikan di daerah dan bagaimana konsep penataan ulang sistem perencanaan pembangunan pendidikan di daerah?

PEMBAHASAN

Hakikat Perencanaan Pembaharuan Pendidikan

Istilah pembaharuan (*innovation*) dapat dipahami dalam arti ganda. *Pertama*, maknanya dilihat dalam bentuk kata sifat, berarti pengenalan sesuatu yang baru. *Kedua*, sebagai kata benda yang bermakna ide baru, cara, tindakan, atau penemuan baru. (Lias Hasibuan^{2004: 71}). Menurut Prescott dan Hoyle, pembaharuan adalah sesuatu yang baru baik dalam bentuk ide maupun praktek,

di mana kebaruan tersebut dirasakan baru pula oleh individu atau kelompok. (Prescott W, and Hoyle E, 1976: 31) Proses ini biasanya berawal dari adanya temuan (*invention*) diikuti oleh proses pengembangan (*development*), dan proses adopsi (*adoption*). (Rogers, 1983: 11)

Mengacu pada pengertian pembaharuan (*innovation*) yang dikemukakan di atas, maka pembaharuan pendidikan dimaknai sebagai suatu upaya mengadakan perubahan dengan memunculkan ide, gagasan, cara, dan tindakan, serta kebijakan pada sektor pembangunan pendidikan. Konteks pembaharuan yang dimaksud adalah ada dimensi kebaruan yang berbeda dengan yang ada sebelumnya, serta sengaja dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Adanya kesadaran untuk melakukan pembaharuan pendidikan pada umumnya didasari oleh beberapa faktor, di antaranya: 1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) bertambahnya jumlah penduduk; 3) rendahnya tingkat kualitas pendidikan; 4) kurangnya kemampuan relevansi pendidikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; dan 5) meningkatnya animo masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Beberapa faktor dasar dilakukannya pembaharuan pendidikan tersebut, maka pada prinsipnya upaya pembaharuan pada sektor pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk merespon secara aktif terhadap tantangan dan permasalahan pendidikan, serta sebagai upaya mengembangkan pendekatan solutif dan produktif dalam memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan pembaharuan (*inovasi*), menurut Rogers terdapat lima karakteristik penentu, yaitu:

1. Kemamfaatan yang diperoleh dari suatu pembaharuan.
2. Kesesuaian pembaharuan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada.
3. Ada dimensi kebermaknaan dan signifikansi.
4. Kompleksitas pembaharuan.
5. Inovasi dapat dirasakan positif oleh para adopter inovasi.

Berkaitan dengan karakteristik-karakteristik pembaharuan (*inovasi*) yang dikemukakan oleh Rogers di atas, maka dalam konteks pembaharuan pendidikan di daerah dapat dilakukan beberapa cara atau strategi pencapaian inovasi sebagai berikut:

1. Menentukan pengambilan keputusan inovasi melalui pemilihan karakteristik inovasi yang

sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan daerah yang diharapkan.

2. Membangun sistem informasi kebijakan pembaharuan pendidikan secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan relevansi pembaharuan pendidikan yang mengacu pada nilai, norma, dan budaya dalam sistem sosial masyarakat.
4. Perwujudan ekspektasi masyarakat dalam memperoleh layanan dan kesempatan mengakses pendidikan secara merata, adil, dan berkualitas.
5. Pelibatan masyarakat (*stakeholders*) secara aktif dan partisipatif dalam pembaharuan pembangunan pendidikan dalam rangka perluasan agen-agen perubahan.

Konsep strategis upaya pembaharuan (inovasi) pendidikan ini sangat perlu direncanakan dengan baik dalam rangka tercapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan unsur penting dan strategis memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Menurut Husaini Usman, perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atau sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam konteks pembaharuan pendidikan, maka perencanaan pembaharuan pendidikan dimaknai sebagai suatu langkah pengambilan keputusan dan pemilihan berbagai alternatif tindakan yang strategis dan terukur berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, secara substantif, konsep perencanaan pembaharuan pendidikan di dalamnya mengandung unsur-unsur yaitu; (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) ada proses, (3) ada hasil yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut dampak sistemik dan berorientasi masa depan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembaharuan pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur adopter inovasi serta elemen-elemen lainnya yang terlibat dan ikut dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, seperti; dimensi masyarakat, politik, dan ekonomi. Atau dengan kata lain, pembaharuan pendidikan tidak terlepas dari komponen-komponen yang lain dalam sistem kehidupan yang lebih luas.

Perspektif Masyarakat, Politik, dan Ekonomi dalam Perencanaan Pembaharuan Pendidikan di Daerah

Setiap langkah pembaharuan pendidikan yang dilakukan pada hakikatnya berupaya agar pembangunan pendidikan benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bagi setiap manusia, suatu bangsa dan negara menjadi kebutuhan yang sangat urgen. Karena sangat urgen, pendidikan selalu ditumbuhkembangkan secara sistematis oleh pemerintah, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.

Tidak satu pun negara di dunia ini berani meremehkan peran pendidikan bangsanya. Adam Smith (1776), seorang tokoh ekonomi klasik ternama, dalam bukunya "*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*" dalam Suyanto, mengemukakan bahwa "pendidikan membawa keuntungan bagi individu dan masyarakat. Tanpa pendidikan yang cukup, maka orang akan terhambat untuk berperan dalam sistem pembagian kerja (*division of labor*)". (Suyanto, 2000: 21). Padahal, menurut teori Adam Smith, justru dengan adanya pembagian kerja inilah faktor produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Itulah sebabnya, setiap negara memiliki sistem pendidikan yang memang dirancang untuk menciptakan keunggulan sumber daya manusia (SDM) bagi bangsanya dengan berbagai pendekatan.

Salah satu pendekatan peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia dewasa ini adalah kebijakan desentralisasi pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan, strategi perencanaan pembaharuan (inovasi) pendidikan di daerah sangat memungkinkan dikembangkan menjadi hubungan simbiotik antara pemerintah, politisi, masyarakat (*stakeholders*) pendidikan, dan pelaku dunia usaha (ekonomi) pada semua tingkatan. Hubungan simbiotik ini diharapkan mampu mendorong pembangunan pendidikan daerah secara berkualitas.

Perencanaan Pembaharuan Pendidikan Perspektif Masyarakat

Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang bersifat komplementer. (Ibrahim Bafadal, 2003: 24) Tanggung jawab masyarakat antara lain dijabarkan dalam bentuk partisipasi masyarakat di semua level tingkatan dalam bidang pembangunan pendidikan.

Perencanaan pembaharuan pendidikan perspektif tingkatan masyarakat perlu dikembangkan dalam bentuk upaya untuk memotivasi orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga penyelenggarapendidikan untuk menjalin hubungan sinergi dan saling membangun program berbasis “*win-win solution*” dalam rangka perwujudan ekspektasi sosial masyarakat terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik dari aspek akses, kesempatan, layanan, pembiayaan, dan kualitas atau mutu secara berkeadilan di seluruh tingkatan masyarakat.

Perencanaan Pembaharuan Pendidikan Perspektif Politisi

Secara sederhana, politik dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kenegaraan, menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem yang ada, menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintahan, serta melaksanakan berbagai ketetapan, sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

M.Sirozi, menegaskan bahwa “pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya memiliki hubungan erat dan dinamis serta saling mempengaruhi”. (M. Sirozi, 2010: 1) Di antara pengaruh politik terhadap pendidikan adalah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah suatu negara atau daerah yang memberikan perhatian serta dukungan politis, moral, dan materil bagi pembangunan pendidikan.

Kebijakan desentralisasi daerah secara tidak langsung bermuara pada desentralisasi secara politis daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah secara otonom. Oleh karena itu, perencanaanpembaharuan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dukungan politik pada level politisi sangat diperlukan terutama dalam konteks penyerapan aspirasi kepentingan politik pendidikan pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi, pengaturan kewenangan pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua peserta didik, kebijakan anggaran, pengawasan, serta sanksi atas pelanggaran dan penyimpangan.

Perencanaan Pembaharuan Pendidikan Perspektif Ekonomi

Sebagaimana halnya aspek politis, aspek ekonomi dan pendidikan juga memiliki hubungan dan pengaruh antara satu dengan yang lain secara integral. Relevansi antara aspek ekonomi dan

pendidikan, menurut Hasan Langgulung, menyangkut *investment* dan hasilnya. Pelaksanaan suatu sistem pendidikan berkualitas sangat ditentukan oleh dukungan ekonomi yang stabil. Maju atau tidaknya suatu pendidikan selalu diukur dengan sejauh mana pendidikan tersebut mampu menunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Demikian pula sebaliknya, seberapa besar tingkat keterserapan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak sangat ditentukan oleh seberapa besar kepedulian pemerintah dalam memberikan akses dan kesempatan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

Pertimbangan ekonomi dalam konteks perencanaan pembaharuan pendidikan di daerah sangat penting diperhatikan, baik pada dimensi tingkat keamanan ekonomi masyarakat maupun pada tingkat kemampuan pembiayaan pendidikannya. Di sinilah kearifan kebijakan ekonomi pendidikan daerah sangat diperlukan bersamaan dengan dukungan dari politisi dan pelibatan pelaku ekonomi secara partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah.

Penataan Ulang Sistem Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Daerah

Kebijakan desentralisasi pendidikan pada hakikatnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menata dan merencanakan pembangunan pendidikan di daerah secara produktif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat yang mereka layani, di samping memiliki wewenang penuh untuk merencanakan, membiayai, dan mengeksekusi rencana tersebut.

Paradigma baru penyelenggaraan pendidikan desentralistik yang semestinya berorientasi pada pengembangan pendidikan masyarakat secara holistik dewasa ini, pada kenyataannya belum terimplementasi secara optimal dalam kebijakan riil perencanaan pembangunan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, perlu membangun konsep penataan ulang perencanaan pembangunan pendidikan di daerah yang berbasis pada pendekatan, model, metodologi, instrumen, dan indikator pencapaian yang jelas, terukur, dan akuntabel.

Pedekatan Perencanaan Pendidikan

Secara teoritis, ada empat pendekatan yang digunakan dalam melakukan perencanaan pendidikan, yaitu (1) pendekatan kebutuhan sosial

(*social demand approach*), (2) pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*), (3) pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*), dan (4) pendekatan terpadu (*integrative approach*).

Pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*) adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh penyusun perencanaan dalam pendekatan ini, antara lain: (1) analisis terhadap pertumbuhan penduduk daerah; (2) analisis tingkat partisipasi warga masyarakatnya dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya analisis persentase penduduk yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan; (3) analisis terhadap mobilitas) peserta didik dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi, misalnya kenaikan kelas, kelulusan, dan *dropout*; (4) analisis terhadap minat atau keinginan warga masyarakat tentang jenis layanan pendidikan di sekolah; (5) analisis tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan secara maksimal dalam proses layanan pendidikan; dan (6) analisis tentang keterkaitan antara *output* satuan pendidikan dengan tuntutan masyarakat atau kebutuhan sosial di masyarakat.

Pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*), adalah pendekatan yang menggunakan keterkaitan lulusan pendidikan dengan tuntutan tenaga kerja. Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini mengutamakan keterkaitan antara *output* (lulusan) layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan tuntutan atau keterserapan terhadap kebutuhan tenaga kerja di masyarakat.

Apabila pendekatan ini dipakai dalam penyusunan perencanaan pendidikan, maka yang perlu dilakukan, adalah: (1) kajian terhadap ragam kebutuhan yang diperlukan oleh dunia kerja yang ada di masyarakat; (2) kajian atau analisis tentang ragam pengetahuan dan *skill* yang perlu dimiliki oleh peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri secara cepat (adaptif) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia kerja; dan (3) mengkaji atau menganalisis tentang sistem layanan pendidikan yang terbaik dan mampu memberikan bekal yang cukup bagi peserta didik untuk terjun di dunia kerja, oleh karena itu perlu dilakukan analisis peluang kerja dan menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri (*link and match*).

Pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*), adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemanfaatan biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pendekatan ini berorientasi pada konsep *Investment in human capital* (investasi pada sumber daya manusia). Pendekatan ini sering disebut pendekatan untung rugi (*cost and benefit approach*).

Ciri-ciri pendekatan ini antara lain: (1) pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar, oleh karena itu perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis; (2) pendekatan ini didasarkan pada asumsi, bahwa: (a) kualitas layanan pendidikan akan menghasilkan *output* yang baik dan secara langsung akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat; (b) sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya; (c) perbedaan pendapatan seseorang di masyarakat, ditentukan oleh kualitas pendidikan bukan ditentukan oleh latar belakang sosialnya; (3) perencanaan pendidikan harus betul-betul diorientasikan pada upaya meningkatkan kualitas SDM, dan dengan tersedianya kualitas SDM, maka diharapkan *income* masyarakat akan meningkat; dan (4) program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan menempati prioritas pembiayaan yang besar.

Adapun pendekatan terpadu (*integrative approach*), adalah pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa pendekatan sistem dapat berfungsi sebagai kerangka yang memadukan ketiga pendekatan perencanaan sistem pendidikan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik.

Asumsi dasar pendekatan integratif adalah, bahwa perencanaan pendidikan disusun berdasarkan pada: (1) keterpaduan orientasi dan kepentingan terhadap pengembangan individu dan pengembangan sosial (kelompok); (2) keterpaduan antara pemenuhan kebutuhan ketenagakerjaan (bersifat pragmatis) dan juga mempersiapkan pengembangan kualitas akademik (bersifat idealis) untuk mempersiapkan studi lanjut; (3) keterpaduan antara pertimbangan ekonomis (untung rugi), dan pertimbangan layanan sosial-budaya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya integrasi sosial-budaya; (4) keterpaduan pemberdayaan terhadap sumber daya lembaga, baik sumber daya internal

maupun sumber daya eksternal; (5) konsep bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam proses layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan suatu sistem; dan (6) konsep bahwa control dan evaluasi pelaksanaan program (perencanaan pendidikan) melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan proses layanan kualitas pendidikan, dengan tetap berada dalam komando pimpinan atau kepala satuan pendidikan.

Model-Model Perencanaan Pendidikan

Selain pendekatan, terdapat beberapa model-model perencanaan yang dapat dikembangkan oleh perencana pendidikan, yaitu: (1) model komprehensif, (2) model pembiayaan dan keefektifan biaya, (3) model *planning, programming, budgeting system* (PPBS), dan (4) model target setting.

Model komprehensif digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam layanan pendidikan secara menyeluruh. Model ini berfungsi juga sebagai pedoman dalam menguraikan beragam rencana yang lebih khusus ke arah tujuan pendidikan yang lebih luas. Model pembiayaan dan keefektifan biaya digunakan untuk menganalisis proyek dengan kriteria efisiensi dan efektivitas pembiayaan layanan pendidikan.

Adapun model *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS), merupakan suatu pendekatan sistematis dan komprehensif yang berusaha menentukan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai dengan menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin, dan mampu menggambarkan kegiatan program pendidikan jangka panjang. Sedangkan model target *setting* dipergunakan untuk memproyeksi tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu dengan pendekatan analisis demografis dan proyeksi penduduk untuk memproyeksikan jumlah peserta didik dan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

Metode Perencanaan Pendidikan

Setiap perencana pendidikan, dalam menata perencanaan pembangunan pendidikan di daerah sangat perlu memahami metode perencanaan. Adapun metode tersebut antara lain, (1) metode analisis sumber-cara-tujuan (*Mean-Ways-Goal Analysis*), (2) metode analisis masukan-keluaran (*Input-Output Analysis*), (3) metode analisis ekonometrik (*Econometrik analysis*), (4) metode diagram sebab akibat (*Cause Effect Diagram*), (5) metode analisis siklus kehidupan (*Life-Cycle Analysis*), dan (6) metode proyeksi.

Metode analisis sumber-cara-tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan pendidikan. Tiga hal yang perlu dianalisis dalam metode ini, yaitu: *means* yang berkaitan dengan sumber-sumber daya yang diperlukan, *ways* yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan untuk dipilih, dan *ends (goal)* yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Metode analisis masukan-keluaran. Metode ini dipakai untuk menganalisis aspek interelasi dan interdependensi berbagai komponen *input* dan *output* dari suatu sistem. Oleh karena itu, diantara yang perlu dilakukan adalah: (1) melakukan analisis tentang faktor-faktor input pendidikan, misalnya: (a) analisis memiliki kebijakan mutu sekolah; (b) analisis sumber daya tersedia dan siap; (c) analisis tentang harapan prestasi yang tinggi; (d) analisis terhadap pelanggan (khususnya pada peserta didik yang masuk); dan (e) analisis manajemen.

Metode analisis ekonometrik. Metode ini memakai data empirik, statistik, kuantitatif dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ini mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem. Metode ini dijabarkan dengan pendekatan: (1) analisis secara empirik atau kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga, yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal; dan (2) analisis tentang peluang *output* dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Metode diagram sebab akibat. Metode ini dipakai dalam perencanaan yang menggunakan sekuen hipotetik untuk mendapatkan gambaran masa depan yang lebih baik. Metode ini cocok untuk perencanaan yang bersifat strategik. Perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini harus melakukan: (1) analisis beragam problem atau beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan adanya analisis SWOT (*Strength* atau kekuatan, *Weakness* atau kelemahan, *Opportunity* atau kesempatan, and *Threat* atau ancaman) secara cermat pada semua aspek atau bidang-bidang pendidikan yang akan dikembangkan.; dan (2) melakukan analisis

tindakan atau langkah-langkah yang tepat, yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi beragam tantangan atau problem yang muncul pada era yang akan datang.

Metode analisis siklus kehidupan, digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan produksi atau *output* layanan pendidikan (lulusan), proyek, program atau aktivitas layanan pendidikan. Tahapan yang perlu diperhatikan oleh penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, adalah: (1) melakukan konseptualisasi program-program dalam perencanaan pendidikan; (2) spesifikasi program-program dalam perencanaan pendidikan; (3) pengembangan prototipe layanan pendidikan; (4) pengujian dan evaluasi program-program dalam perencanaan pendidikan; (5) operasi; dan (6) produk atau *output* layanan pendidikan (lulusan).

Di antara metode yang biasa digunakan dalam perencanaan pendidikan adalah metode proyeksi. Metode ini paling banyak dipakai dalam perencanaan pendidikan di tingkat mikro (lembaga satuan pendidikan). Perencanaan pendidikan yang menggunakan metode proyeksi, akan menghasilkan cara (metode) pemecahan masalah data persekolahan, proyeksi penduduk usia sekolah, proyeksi peserta didik, proyeksi ruang kelas, proyeksi kebutuhan guru, dan sebagainya.

Berbagai pendekatan, model, dan metode perencanaan pembangunan pendidikan tersebut, secara konseptual sangat ideal dikembangkan dalam menata ulang sistem perencanaan pembangunan pendidikan di daerah.

Indikator Kinerja Perencanaan Pembangunan Pendidikan

Indikator kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Penggunaan indikator dan variabel kinerja pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara atau suatu daerah. Di Negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan

kesehatan pedesaan, pemberantasan buta aksara, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara atau daerah yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangun bergeser kepada faktor-faktor sekunder sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan daerah akan mengakibatkan semakin terarahnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dan semakin tinggi respons masyarakat dalam menyukseskan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Relevansinya dengan indikator kinerja perencanaan pembangunan pendidikan di daerah dalam konteks desentralisasi pendidikan, maka menurut hemat penulis bahwa indikator kinerja tersebut dapat diukur dengan melihat beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
2. Kesetaraan perlakuan sektor pembangunan pendidikan dengan sektor lain.
3. Perluasan peluang bagi peran serta masyarakat dalam pendidikan.
4. Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan daerah dan pendidikan nasional.
5. Penyediaan anggaran pendidikan yang lebih besar dari pemerintah.
6. Pengembangan aspek-aspek budaya yang terkait dengan desentralisasi pendidikan berperspektif global.
7. Perbaikan sistem manajemen komponen pendidikan berbasis mutu, relevansi, keunggulan, dan kemandirian.

Secara implementatif, bagaimana pun konsep pembaharuan dan apa pun pendekatan, model, metode dan rumusan indikator kinerja penataan perencanaan pembangunan pendidikan yang dikembangkan di daerah, pada prinsipnya, bahwa daerah berkewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam PP No. 25 Tahun 2000 sebagai tindak lanjut kebijakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pengelolaan yang desentralistik, diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat pembaharuan pendidikan adalah upaya untuk mengadakan perubahan dengan memunculkan ide, gagasan, cara, dan tindakan, serta kebijakan pada sektor pembangunan pendidikan secara produktif dan inovatif. Dalam pelaksanaan perencanaan pembaharuan pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur adopter inovasi serta elemen-elemen lainnya yang terlibat dan ikut dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, seperti; dimensi masyarakat, politik, dan ekonomi.
2. Indikasi masih terjadinya miskonsepsi dalam aspek kebijakan riil perencanaan pembangunan pendidikan di daerah, maka perlu membangun konsep penataan ulang perencanaan pembangunan pendidikan di daerah yang berbasis pada pendekatan, model, metodologi, instrumen, dan indikator pencapaian yang jelas, terukur, dan akuntabel. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu: (1) pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*), (2) pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*), (3) pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*), dan (4) pendekatan terpadu (*integrative approach*). Adapun model yang dapat dikembangkan yaitu: (1) model komprehensif, (2) model pembiayaan dan keefektifan biaya, (3) model *planning, programming, budgeting system* (PPBS), dan (4) model target setting. Sedangkan metode perencanaannya adalah; (1) metode analisis sumber-cara-tujuan (*Mean-Ways-Goal Analysis*), (2) metode analisis masukan-keluaran (*Input-Output Analysis*), (3) metode analisis ekonometrik (*Econometrik analysis*), (4) metode diagram sebab akibat (*Cause Effect Diagram*), (5) metode analisis siklus kehidupan (*Life-Cycle Analysis*), dan (6) metode proyeksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, "Konsep Perencanaan, Model dan Pendekatan Perencanaan Pendidikan", <https://drarifin.wordpress.com/2010/07/15/konsep-perencanaan-pendekatan-dan-model-perencanaan-pendidikan>. (01 Desember 2017).
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju*

- Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Danim, Sudarwan, *Otonomi Manajemen Sekolah*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Hasibuan, Lias, *Melejitkan Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi, dan Rekonstruksi Kurikulum*. Jambi: SAPA Project, 2004.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita, 2001.
- Kristiadi, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1999.
- Langgung, Hasan, *Pendidikan Islam dan Peralihan Paradigma*. Selangor: HIZBI, 1995.
- Nizar, Samsul, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Prescott W, and Hoyle E., *Innovation Problems and Possibilities*. London: The Open University Press, 1976.
- Rogers, *Deffusion of Innovation*. Ney York: The Free Press, 1983.
- Sirozi, M., *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita, 2000.
- Suyanto, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Yogyakarta: Adicita, 2004.
- Tabrani, H.A. Rusyan, *Membangun Disiplin Karakter Anak Bangsa*. Jakarta: PT Pustaka Dinamika, 2012.
- Tilaar, H.A.R., *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Usman, Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Utsman, Kahar dan Nadhirin, *Perencanaan Pendidikan*. Kudus: STAIN Kudus Press, 2008.